



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

### SIARAN PERS

#### **BPK Perwakilan Banten Serahkan LHP LKPD Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Serang**

**Serang, 23 Mei 2022** – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Serang Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang dan Wali Kabupaten Serang.

Kepala Perwakilan BPK Banten, **Novie Irawati HERNI Purnama** menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Serang Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang, H. Bahrul Ulum, S.Ag., M.AP. dan Bupati Serang, Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak. di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (23/5).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas LKPD Kabupaten Serang Tahun 2021, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas LKPD TA 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Serang.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Serang, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Penganggaran Pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Serang Belum Memadai;
2. Penatausahaan Aset Tetap belum memadai; dan
3. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS belum memadai.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Dalam sambutannya Novie Irawati menyampaikan bahwa besarnya manfaat dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Kabupaten Serang dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

“BPK berharap agar Pimpinan Pemerintah Kabupaten Serang dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” ungkap Novie Irawati.